BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berdasarkan identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya mengenai pengawasan *Account Representative* (AR) atas penyampaian SPT Masa PPN yang tidak benar oleh PKP sudah dilakukan dengan cukup optimal karena pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas *Account Representative* berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) terhadap Penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sudah dilaksanakan dengan optimal, karena hanya sebagian kecil PKP yang melakukan tindakan penyimpangan perpajakan dan dengan adanya pengawasan kasus penyimpangan perpajakan dapat terungkap. Pengawasan *Account Representative* atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dari tiap bulan dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan dengan optimal. Selain itu, maraknya kasus penyimpangan perpajakan

tidak memperngaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya karena dengan adanya peningkatan pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2008 ke tahun 2009.

2. Adanya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam mengawasi SPT Masa PPN yaitu beragamnya pemahaman wajib Pajak/PKP atas peraturan pajak yang berlaku sering kali terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak/PKP dengan fiskus, serta adanya keterbatasan jumlah *Account Representative* (AR), dimana seorang *Account Representative* (AR) harus mengawasi satu hingga tiga kelurahan, hal ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak/PKP yang tersebar di setiap kelurahan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam mengawasi SPT Masa PPN yaitu dengan melakukan penyuluhan, penyuluhan dilakukan dengan melaksanakan beberapa tahapan yaitu tahap analisa rencana penyuluhan, tahap pelaksanaan penyuluhan dan tahap evaluasi. Selain melakukan penyuluhan, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees guna mengoptimalisaikan fungsi pengawasan yaitu melakukan pendataan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam rangka menanggulangi keterbatasan jumlah *Account Representative* (AR) maka dilakukan penambahan SDM yang berkompeten untuk meringankan beban kerja *Account Representative* (AR).

5.1 Saran

Penulis memiliki beberapa saran setelah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kasus penggunaan faktur fiktif oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees diharapkan kasus tersebut tidak akan terjadi lagi. Pengawasan harus dilakukan dengan lebih efektif oleh *Account Representative* (AR) yang berada di bawah naungan Seksi Pengawasan dan Konsultasi agar para Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak akan melakukan penyimpangan pajak berupa penggunaan faktur pajak fiktif.
2. Sebaiknya dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan pada msasyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di suatu Kantor Pelayanan Pajak juga semakin meningkat. Demikian halnya dengan wajib pajak yang telah tercatat sebesar Wajib Pajak semakin sadar untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Sebaiknya dilakukan penambahan *Account Representative* (AR), karena adanya ketidakseimbangan antara *Account Representative* (AR) dengan jumlah wajib pajak/PKP yang harus diawasinya sehingga akan mengurangi beban *Account Representative* (AR) guna untuk mengoptimalisasikan fungsi pengawasan pada Kantor Pelayanan Pajak.